



KONDISI POLITIK DAN KEAMANAN AFGHANISTAN DI BAWAH REZIM TALIBAN DAN SIGNIFIKANSINYA TERHADAP GEOPOLITIK GLOBAL

Afghanistan's Political and Security Conditions under Taliban's Regime and Its Significances to Global Geopolitics

BOY ANUGERAH¹, JABINSON PURBA²

¹ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI)/SGPP Indonesia,
b.anugerah@sgpp.ac.id, 081212735156

² Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI), jabinsontp@gmail.com,
08122425371

ABSTRAK. Kebijakan Amerika Serikat di bawah Presiden Joe Biden untuk menarik seluruh pasukan Amerika Serikat di Afghanistan paling lambat 11 September 2021 menimbulkan turbulensi politik dan keamanan di level domestik Afghanistan. Pemerintahan Afghanistan yang dibentuk Amerika Serikat di bawah rezim Presiden Ashraf Ghani kolaps digantikan oleh rezim Taliban yang berkuasa sejak pertengahan Agustus 2021 yang lalu. Kembalinya Taliban sebagai rezim berkuasa di Afghanistan menimbulkan signifikansi politik dan keamanan, tidak hanya di internal Afghanistan, tapi juga bagi geopolitik global. Tulisan ini bertujuan untuk memetakan situasi dan kondisi Afghanistan di bawah rezim Taliban, serta signifikansinya terhadap geopolitik global. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode *desk research*. Analisis data dilakukan dengan metode *literature review* dan *annotated bibliography*. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) terjadi instabilitas politik dan keamanan di Afghanistan yang berpotensi berlangsung dalam jangka panjang, serta (2) instabilitas politik dan keamanan di Afghanistan berdampak signifikan terhadap geopolitik global, khususnya kepentingan nasional dan kebijakan luar negeri negara-negara terkait. Sebagai simpulan, dibutuhkan kerja sama global dan komprehensif dari aktor-aktor global, baik dari unit analisis negara maupun unit analisis organisasi global.

Kata Kunci: Politik, Keamanan, Afghanistan, Taliban, Geopolitik Global

ABSTRACT: *The USA's policy under President Joe Biden to withdraw all USA's troops in Afghanistan by September, 11th 2021, at the latest, has caused the political and security turbulences at the Afghanistan domestic level. The Afghanistan government formed by the USA under the regime of President Ashraf Ghani collapsed and was replaced by the Taliban regime that has taken control since mid of August 2021. The return of the Taliban as the ruling regime has caused political and security significances, not only for Afghanistan but also for global geopolitics. This research aims to map out the situation and condition of Afghanistan under the Taliban regime, as well as its significances to global geopolitics. This research uses a descriptive qualitative approach. Data collection was conducted by using the desk research method. Data analysis was carried out by using literature review and annotated bibliography methods. The results of this research are: (1) political and security instability in Afghanistan has the potential to last in long term, and (2) political and security instability in Afghanistan has a significant impact on the global geopolitics, particularly the national interests and foreign policies of related countries. In conclusion, global and comprehensive cooperation from the global actors is needed, both from the state analysis unit, and the global organization analysis unit.*

Keywords: *Politics, Security, Afghanistan, Taliban, Global Geopolitics*



PENDAHULUAN

Sirkumstansi global dan nasional yang mempengaruhi, serta kalkulasi rasional atas kepentingan nasional yang hendak dicapai, menjadi faktor-faktor pendorong bagi Amerika Serikat di bawah rezim Presiden Joe Biden untuk menempuh kebijakan penarikan mundur seluruh pasukan militer Amerika Serikat di Afghanistan paling lambat pada 11 September 2021, menandai dua dekade tragedi 9/11 dan awal mula invasi Amerika Serikat di Afghanistan sebagai implementasi *Global War on Terrorism (GWOT)* (Borelli, 2005). Kebijakan penarikan mundur seluruh pasukan yang ditempuh oleh Joe Biden ini selaras dengan kebijakan pendahulunya, Donald Trump, meskipun keduanya berasal dari partai politik yang berbeda. Joe Biden berasal dari Partai Demokrat yang bercorak humanis dan pro-demokrasi, sedangkan Donald Trump berasal dari Partai Republik yang bercorak konvensional dan realis dalam politik luar negerinya.

Pilihan Joe Biden untuk menarik mundur militer Amerika Serikat di Afghanistan ditimbang dari kacamata kepentingan nasional Amerika Serikat merupakan sebuah pilihan rasional (*rational choice*) dalam perumusan kebijakan luar negeri. Situasi pandemi

Covid-19 yang membekap Amerika Serikat dewasa ini menjadi pemicu munculnya kebutuhan finansial yang tidak sedikit dalam rangka melindungi warga negaranya, baik dalam konteks proteksi dari sisi kesehatan maupun jaring pengaman sosial dan ekonomi. Pilihan untuk mempertahankan gelar pasukan di Afghanistan yang sudah berlangsung sejak 2001 menjadi sebuah kebijakan irasional menilik besarnya sumber daya finansial dan *human cost* yang harus dialokasikan. Kompleksitas problematika politik luar negeri Amerika Serikat yang saat ini berebut pengaruh dengan Cina dan Rusia di berbagai *front* (seperti di Asia Tengah, serta Indo-Pasifik) menjadi faktor pelengkap bagi Amerika Serikat di bawah rezim Joe Biden untuk menyudahi eksistensinya di Afghanistan (Nainggolan, *Kepentingan Strategis Amerika Serikat di Asia Pasifik*, 2013).

Kebijakan penarikan mundur pasukan oleh Amerika Serikat ini bukanlah kebijakan tanpa eksekusi. Belum tuntas penarikan mundur yang dilakukan, Taliban, rezim yang pernah berkuasa di Afghanistan sejak 1996-2001, hingga dilengserkan Amerika Serikat karena dituding melindungi Osama bin Laden dan kelompok Al-Qaeda, kembali berkuasa sejak medio Agustus 2021 dengan menduduki Kabul dan istana kepresidenan Afghanistan. Jatuhnya



Afghanistan ke tangan Taliban merupakan sebuah kondisi yang berada di luar prediksi atau prakiraan intelijen Amerika Serikat. Di masa Donald Trump, tepatnya pada 2020, Amerika Serikat menggagas beberapa kali perundingan dengan Taliban dalam rangka menciptakan situasi politik dan keamanan yang kondusif bagi rezim pemerintahan Afghanistan yang dibentuk dan dikendalikan Amerika Serikat (Nainggolan, 2021). Namun demikian, pilihan berunding dengan kelompok yang sangat konservatif dan militan ini ternyata bukan merupakan langkah yang tepat. Taliban sukses memanfaatkan momen penarikan mundur militer Amerika Serikat pada Agustus 2021 sebagai momentum bagi mereka untuk kembali berkuasa di Afghanistan.

Amerika Serikat bisa dikatakan keliru dan lengah dalam pelaksanaan kebijakan luar negerinya di Afghanistan. Pertama, narasi untuk menciptakan *common enemy* dengan menempatkan Taliban dan Al-Qaeda sebagai kelompok-kelompok teroris ternyata tidak cukup kuat untuk mendorong demokratisasi politik dan pemerintahan di Afghanistan, sebuah cita-cita yang hendak diwujudkan Amerika Serikat sebagai legitimasi atas invasi yang mereka lakukan. Narasi tersebut menjadi tawar tatkala mereka tidak bisa menanggung *financial* dan *human cost* yang begitu besar. Kedua, Amerika Serikat

keliru apabila menganggap Taliban benar-benar hilang dari Afghanistan pasca dilengserkan pada 2001. Sejatinya kelompok Taliban tidak benar-benar tersisih. Taliban bersikap cerdik dengan melakukan pergerakan-pergerakan di wilayah pedesaan yang notabene jauh dari pengamatan militer Amerika Serikat. Mereka juga cerdik memanfaatkan momen ketika Amerika Serikat tidak terlalu fokus dalam mengelola Afghanistan karena harus membagi perhatiannya ke Irak, sebuah negara yang juga ditaklukkan dengan metode *GWOT* pada 2003 (Fawaid, 2021).

Kehadiran kembali Taliban sebagai rezim penguasa di Afghanistan merupakan fenomena yang menarik untuk dicermati. Banyaknya warga negara Afghanistan yang eksodus ke luar negeri menunjukkan bahwa Taliban memiliki tingkat penerimaan yang rendah di mata masyarakat. Hal ini lumrah mengingat rezim Taliban menganut kebijakan yang represif. Masyarakat Afghanistan tentu tidak lupa bagaimana kerasnya sikap para pemimpin Taliban selama memimpin Afghanistan pada periode 1996-2001. Taliban tidak segan-segan melakukan eksekusi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda mazhab, seperti melakukan pembantaian terhadap penduduk etnis Hazar yang menganut ajaran Islam Syiah. Taliban juga berlaku sangat keras terhadap kaum perempuan



dengan melarang kaum perempuan untuk mengenyam pendidikan dan bekerja. Perempuan Afghanistan juga dilarang untuk mendengarkan musik, menonton film, serta menikmati hiburan lainnya (Tristam, 1986). Sikap represif Afghanistan ini mengundang penolakan keras dari masyarakat Afghanistan yang merasa dikungkung kebebasannya. Sedangkan pihak di luar Afghanistan memandang bahwa sikap Taliban menunjukkan karakter mereka yang tidak demokratis. Oleh sebab itu, menarik untuk mencermati Afghanistan di bawah rezim Taliban saat ini, apakah akan menempuh kebijakan seperti masa lampau atau menempuh kebijakan yang lebih moderat di tengah banyaknya sorotan dan tekanan dunia internasional.

Dalam konteks regional dan global, berkuasanya Taliban di Afghanistan juga sangat menarik untuk dicermati. Bangkitnya Taliban yang notabene memiliki kedekatan ideologis dengan Al-Qaeda dikhawatirkan banyak negara akan menghidupkan kembali sel-sel terorisme global di seluruh dunia. Cina dan India sebagai dua negara yang memiliki kedekatan geografis dengan Afghanistan sangat mewaspadai potensi ini. Bangkitnya Taliban dikhawatirkan akan menimbulkan euforia bagi kelompok-kelompok yang dicap sebagai teroris oleh Pemerintah Cina dan India. Cina saat ini sedang disibukkan

pada upaya untuk meredam gejolak perlawanan di Provinsi Xinjiang yang didominasi oleh minoritas Muslim Uighur. Sedangkan India saat ini khawatir bahwa kebangkitan Taliban di Afghanistan akan meningkatkan kembali gerakan-gerakan teror di Pakistan yang secara geografis berbatasan langsung dengan India, terutama di wilayah Kashmir yang menjadi sengketa kedua negara (Cheema, 2015).

Selain itu, eses lainnya dalam konteks global yang potensial untuk muncul adalah dijadikannya Afghanistan sebagai wilayah perebutan kepentingan banyak negara. Cina sebagai seteru utama Amerika Serikat saat ini adalah kekuatan paling potensial untuk hadir dan menancapkan pengaruhnya. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan secara deskriptif dan analitis mengenai kondisi politik dan keamanan di Afghanistan setelah diambil alih oleh kelompok Taliban pada Agustus 2021, serta memetakan signifikansi atau dampak yang ditimbulkan terhadap geopolitik global, khususnya perubahan kepentingan nasional dan pola kebijakan luar negeri yang ditempuh oleh negara-negara terkait. Secara umum, perumusan masalah dalam penulisan artikel ini adalah: ***“Bagaimana kondisi politik dan keamanan Afghanistan di bawah rezim Taliban, serta apa signifikansinya terhadap geopolitik global?”***



METODE

Metode penelitian didefinisikan sebagai mekanisme ilmiah yang ditempuh oleh seorang peneliti untuk mendapatkan data dan informasi guna tujuan atau kepentingan yang bersifat spesifik (Sugiyono, 2016). Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yakni mekanisme penelitian yang digunakan untuk memahami situasi, fenomena, serta kejadian, yang tidak berfokus pada hal-hal yang sifatnya matematis dan statistik. Metode penelitian kualitatif deskriptif bertumpu pada kapasitas dan kapabilitas peneliti untuk memahami objek penelitian, serta mendeskripsikan objek penelitian tersebut secara objektif (Potter, 2013). Pengumpulan data dilakukan melalui mekanisme *desk research* dengan mengolah data-data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, dan artikel-artikel yang relevan dengan objek penelitian, baik melalui media daring maupun luring. Analisis data dilakukan dengan metode tinjauan literatur dan *annotated bibliography*, yakni menyeleksi data dan informasi yang paling relevan dari seluruh data dan informasi yang dikumpulkan. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, dilakukan proses

triangulasi (*triangulation process*) dengan melakukan kroscek antarteori dan sumber yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Kelompok Taliban

Taliban merupakan sebuah kelompok politik dan agama yang bersifat sangat konservatif yang berdiri di Afghanistan pada dekade 1990-an. Kemunculan Taliban di Afghanistan bersamaan dengan penarikan mundur pasukan militer Uni Soviet, keruntuhan rezim komunis yang berkuasa di Afghanistan, serta rusaknya tatanan kehidupan sipil dan politik di negara tersebut. Taliban berasal dari bahasa Pashtun, yang berarti “siswa” atau “murid”. Mereka yang menjadi anggota Taliban sebagian besar merupakan siswa di madrasah-madrasah yang didirikan untuk pengungsi Afghanistan di Pakistan Utara pada dekade 1980-an ketika negara tersebut dikecamuk oleh perang. Didirikan oleh Mullah Muhammad Omar yang bercita-cita untuk mengembalikan Afghanistan menjadi sebuah negara yang damai dan stabil, serta menjalankan ajaran Islam secara ketat dalam setiap praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara oleh seluruh masyarakatnya.

Kemunculan Taliban pada 1994 sebagai sebuah kelompok yang



menghendaki tercapainya ketertiban sosial di provinsi selatan Afghanistan, yakni Kandahar. Postur dan kekuatan Taliban semakin besar pada penghujung 1996 karena mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat Afghanistan yang beretnis Pashtun di selatan Afghanistan, serta adanya dukungan dari kelompok-kelompok Islam konservatif yang berasal dari eksternal Afghanistan. Selain dukungan dari skop domestik, faktor pendukung lainnya bagi Taliban sehingga menjadi kekuatan yang besar adalah kedekatan antara Taliban dengan Pakistan. Pemerintah Pakistan menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat Afghanistan di pengungsian selama perang berlangsung, yang mana masyarakat inilah yang kelak merupakan anggota dan pengikut Taliban. Tidak hanya menyediakan tempat tinggal saja, Pakistan juga memberikan pendidikan kepada para pengungsi tersebut guna kepentingan jangka panjang Pakistan ke depan.

Sebagai sebuah kelompok sekaligus pergerakan, Taliban memiliki ideologi yang mereka anut. Ideologi Taliban merupakan kombinasi dan inovasi syariah antara Pashtunwali dan paham Deobandi. Paham Deobandi muncul dari gerakan revivalis penganut Sunni, berkembang sebagai reaksi atas kolonialisme Inggris yang berlangsung di India. Kelompok ini kemudian membangun madrasah Islam

yang diberi nama Darul 'Ulum Deoband pada 1866 di India Utara. Madrasah ini didirikan untuk mengatasi masalah kurangnya pendidikan Islam yang dienyam oleh muslim-muslim di India. Penganut paham Deobandi juga dikenal sebagai pendukung utama doktrin *taqlid* buta. Dalam pemahaman kelompok ini, seorang muslim harus mematuhi empat madzhab hukum Islam Sunni. Penganut paham Deobandi sendiri merupakan pengikut madzhab Hanafi (Spevack, 2014).

Ada tujuh karakter utama yang dimiliki oleh madrasah Darul 'Ulum Deobandi, yakni: (1) harus patuh pada hukum Islam, yakni syariah, (2) melakukan penyucian diri dan pencarian kesempurnaan beragama melalui jalan sufisme, (3) mengikuti prinsip-prinsip yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, (4) menggunakan madzhab Hanafi, (5) aqidah menurut madzhab Hanafi, (6) pembersihan dari hal-hal yang batil, seperti syirik, bid'ah, atheisme, dan materialisme, serta (7) ketaatan pada prinsip tersebut secara personal diwujudkan oleh pendiri sekolah tersebut, yakni Muhammad Qashim dan Rashid Gangohi. Mereka yang menjadi pengikut aliran Deobandi disebut juga sebagai fundamentalisme Islam. Oleh sebab itu, Taliban juga disebut sebagai gerakan fundamentalisme Islam. Pelabelan Taliban



sebagai gerakan fundamentalisme Islam dapat dilihat dari visi politik yang mereka anut, yakni menolak pemisahan antara agama dan negara (Maley, 1999).

Beberapa bentuk penafsiran hukum Islam atau syariah yang dianut oleh Taliban antara lain mengharamkan untuk mengkonsumsi daging babi, larangan untuk minum alkohol, larangan untuk mendengarkan musik karena dianggap haram, larangan untuk menonton televisi, larangan membuat film, larangan untuk berkesenian, seperti fotografi atau melukis, serta larangan bagi perempuan untuk berolahraga, keluar rumah, bekerja, dan menempuh pendidikan. Terhadap pria, Taliban melarang kaum pria di Afghanistan untuk mencukur jenggot. Para pria diwajibkan untuk menutup kepala. Terkait aturan-aturan ini, Taliban berlaku sangat keras dan tidak mau berkompromi dengan masyarakat. Taliban bahkan tidak bersedia untuk berdiskusi atau membahas tentang penafsiran Al-Quran versi mereka dengan siapapun (Maley, 1999).

Seperti yang dikemukakan sebelumnya, selain menganut paham Deobandi, Taliban juga menganut Pashtunwali pra-islam. Pashtunwali ini digunakan sebagai kaidah atau pedoman dalam menentukan permasalahan sosial yang mereka hadapi. Secara khusus,

Pashtunwali merupakan sebuah kode etik yang bersifat tidak tertulis, serta cara hidup tradisional yang dianut dan dipraktikkan oleh orang-orang Pashtun asli. Hal inilah yang menjadi faktor penjelas mengapa eksistensi Taliban sebagai sebuah gerakan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat beretnis Pashtun di seluruh Afghanistan. Yang menguntungkan bagi Taliban adalah kelompok Pashtun di wilayah barat Afghanistan, yang notabene berbeda pandangan dalam banyak hal, menyatakan dukungannya kepada Taliban dikarenakan ajaran Pashtunwali yang dipegang dan dipedomani oleh Taliban tersebut. Sebagai praktik empirik, penerapan ajaran Pashtunwali dapat dilihat dalam hal pembagian warisan. Dalam ajaran Pashtunwali, warisan dibagi rata di antara seluruh anak lelaki. Hal ini berbeda dari ajaran Islam bahwa perempuan berhak mendapatkan harta warisan setengah dari anak laki-laki.

Taliban akhirnya menjadi penguasa sah Afghanistan pada 1996. Taliban membentuk pemerintahan dengan nama *Imarah Islam Afghanistan* dengan pemimpin tertinggi dijabat oleh Mullah Muhammad Omar dan perdana menteri Mohammad Rabbani Akhund Rabbani (Rashid, 2000). Pemerintahan Taliban yang dipimpin oleh Mullah Omar cenderung mengambil keputusan secara sepihak



terhadap berbagai permasalahan kenegaraan dengan tidak mengadakan konsultasi dengan siapapun. Mullah Omar menggunakan mekanisme baiat untuk kesetiaan dan menggunakan gelar *Amirul Mukminin* untuk dirinya, mencontoh apa yang berlaku di masa Rasulullah SAW dan empat khalifah pertama. Selain itu, Afghanistan di bawah kepemimpinan Taliban sejak 1996 tidak menyelenggarakan pemilihan umum karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah. Pemerintahan Afghanistan di bawah Taliban yang berlangsung sejak 1996 hingga 2001 hanya diakui oleh Pakistan, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Sebaliknya, rezim Taliban tidak mendapatkan pengakuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) karena dianggap banyak melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) dan supremasi hukum (Guelke, 2006).

Sepanjang Taliban memimpin Afghanistan pada periode 1996 hingga 2001, setidaknya ada aspek yang bisa dicermati untuk memetakan karakteristik Pemerintahan Taliban pada tataran empirik, bukan pada tataran filosofis atau mendasar seperti yang dieksplanasi sebelumnya. Pada tataran empirik, pencermatan terhadap Taliban dapat dilakukan pada dua aspek, yakni aspek ekonomi dan aspek sosial. Pada aspek

ekonomi, Taliban memberlakukan pajak sebesar 50 persen pada korporasi-korporasi yang beroperasi di Afghanistan. Perusahaan-perusahaan yang tidak sanggup membayar dilarang beroperasi. Pada tataran yang ekstrem, perusahaan-perusahaan ini akan diserang oleh militer Taliban. Selain pengenaan pajak 50 persen kepada korporasi, Taliban juga memberlakukan kebijakan pajak impor sebesar 60 persen untuk apapun barang atau komoditas yang dibawa ke Afghanistan. Pilihan-pilihan kebijakan ekonomi yang ditempuh oleh Taliban ini pada akhirnya membawa Afghanistan terpuruk di bidang perekonomian. Kebijakan ekonomi lainnya yang ditempuh oleh rezim Taliban adalah melakukan perjanjian transit dengan Pakistan untuk perdagangan opium. Perdagangan opium ini menjadi sumber pendapatan resmi terbesar Taliban dengan kisaran USD 100-130 juta per tahun (Nojum, 2002).

Pada aspek sosial, pemberlakuan hukum Islam atau syariah oleh rezim Taliban dijalankan dengan melakukan penambahan pandangan-pandangan politik Taliban berdasarkan hukum Islam yang dianut tersebut. Taliban menjalankan syariah secara revolusioner dengan merombak secara total adat-istiadat dan aturan-aturan tradisional yang dipegang oleh masyarakat Afghanistan. Untuk



memastikan penegakan syariah dan terciptanya kepatuhan hukum di masyarakat, Taliban membentuk Departemen *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* yang dikepalai oleh Mullah Qalam Ad'din, serta membentuk polisi keagamaan. Khusus polisi keagamaan, mereka yang tergabung dalam organisasi ini melakukan patroli secara rutin di kota-kota besar di Afghanistan dengan membawa cambuk dan senapan. Tak jarang mereka melakukan tugas mereka secara brutal. Pengelolaan negara seperti ini menimbulkan rasa takut dan kecemasan yang luar biasa yang dirasakan oleh masyarakat Afghanistan, terlebih lagi kaum perempuan. Penerapan hukum syariah pada dasarnya adalah kebijakan yang sah, terlebih lagi bersumber dari ajaran Islam yang suci, yakni Al-Quran. Namun demikian, penerapan hukum syariah versi Taliban dilakukan tanpa melalui proses legislasi, melainkan melalui dekrit atau keputusan langsung dari pemimpin tertinggi melalui siaran radio (Amal, 2004).

Taliban Pasca Invasi Amerika Serikat 2001

Taliban tidak terlalu lama berkuasa di Afghanistan. Naik dan berkuasa pada 1996, Taliban digulingkan oleh Amerika Serikat melalui sebuah invasi militer bertajuk *GWOT* karena rezim Taliban dituding

memberikan perlindungan kepada Osama bin Laden, pimpinan jaringan teroris Al-Qaeda, dalang di balik tragedi 9/11 di Amerika Serikat. Perlindungan yang diberikan Taliban kepada Osama bin Laden, langsung atau tidak langsung telah menempatkan Taliban sebagai target operasi Amerika Serikat. Talibanpun dicap sebagai gerakan teror, seperti halnya Al-Qaeda. Amerika Serikat yang pada waktu itu berada di bawah pemerintahan Presiden Bush Jr mengeluarkan pernyataannya yang sangat terkenal, yakni *"either you are with us, or you are with terrorist"* (Council on Foreign Relations, 2020). Melalui pernyataan ini, Amerika Serikat secara tidak langsung hendak mengatakan bahwa, siapapun yang tidak mendukung upaya perang global melawan terorisme yang mereka dukung, maka akan dianggap sebagai pendukung teroris. Sebuah bentuk cara pandang yang sangat realis dan sarat kepentingan nasional yang diusung secara unilateralis (dari perspektif Amerika Serikat sendiri).

Terhadap Taliban yang dianggap melindungi Osama bin Laden, Amerika Serikat menjalankan Operasi *Enduring Freedom Afghanistan (OEF-A)* pada 7 Oktober 2001. Sebagai hasil dari pelaksanaan operasi ini, Taliban kehilangan kendali terhadap Kota Mazar e Sharif pada 9 November 2001, dan sebulan kemudian,



Taliban terpaksa melarikan diri ke wilayah Kandahar, Taloqan, Bamiyan, Herat, Kabul, dan Jalalabad (Council on Foreign Relations, 2020). Pada Desember 2001, Amerika Serikat menjalankan operasi lanjutan bernama Operasi Tora Bora. Pada 2003, Amerika Serikat menjalankan Operasi *Anaconda*, yakni sebuah serangan darat terstruktur dengan jumlah pasukan yang sangat besar, yakni sekitar 200 tentara Amerika Serikat dan 1.000 tentara Afghanistan yang bertempur melawan 1.000 kelompok militan gabungan, yakni Taliban dan Al-Qaeda (Katzmen Kenneth, 2017). Untuk mempertahankan kesinambungan operasi, pasca Operasi *Anaconda*, Amerika Serikat menjalankan Operasi *Mountain Lion*.

Pada 2003, Amerika Serikat menjalankan invasi militer ke Irak dalam kerangka *GWOT*, sama seperti halnya yang dilakukan di Afghanistan. Invasi Amerika Serikat ke Irak tersebut berdampak pada melemahnya konsentrasi Amerika Serikat di Afghanistan. Situasi seperti ini dimanfaatkan secara optimal oleh Taliban dengan melakukan penguatan kembali kapasitas dan posisi mereka di Afghanistan. Amerika Serikat yang sedang lengah merupakan momentum bagi Taliban untuk melakukan konsolidasi kekuatan dan organisasional mereka. Hasilnya, Taliban mampu mengambil alih kekuasaan di

beberapa wilayah, seperti selatan dan timur Afghanistan. Pilihan strategi yang ditempuh oleh Taliban adalah dengan melakukan penyerangan mendadak terhadap pos pemerintah dan militer. Taliban juga menerapkan strategi perang gerilya dikarenakan postur perang yang tidak *balance* dengan militer pemerintah yang didukung penuh oleh pasukan militer Amerika Serikat., akan tetapi Taliban memiliki keunggulan dalam hal pemahaman yang lebih baik akan medan perang Afghanistan.

Amerika Serikat menyadari kelengahannya berdampak pada resureksi kekuatan Taliban. Sebagai respons militer, Amerika Serikat kemudian menjalankan *Khanjar Panther's Claw Operation* yang didukung penuh oleh pasukan koalisi *ISAF* dan *NATO*. Operasi militer terhadap Taliban terus berlanjut hingga 2010 melalui *Moshtarak and Kandahar Operation*. Namun demikian, rangkaian serangan dan operasi militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat, didukung oleh tentara Afghanistan dan sekutu mereka di NATO tidak mampu melemahkan kekuatan Taliban. Pada 2017, Taliban melancarkan Operasi Mansori dengan melakukan penyerangan terhadap pasukan asing di Afghanistan, serta mengambil alih beberapa distrik penting. Di tengah pertarungan kekuatan antara Taliban dan Amerika Serikat, situasi



Afghanistan menjadi kacau karena kehadiran *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)* yang tidak hanya beroperasi di Irak dan Suriah, tapi juga merambah Afghanistan yang sudah bergejolak.

Pada 2018, terjadi perubahan yang signifikan dalam pola kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Afghanistan. Pilihan kebijakan yang sebelumnya didominasi oleh operasi militer berubah menjadi upaya untuk melakukan negosiasi damai dengan Taliban. Proses negosiasi kedua pihak berlangsung secara simultan dan intensif hingga berujung pada terciptanya kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Taliban pada 29 Februari 2020, di Doha, Qatar. Ada empat poin penting dalam kesepakatan damai tersebut, yakni: (1) upaya penarikan pasukan Amerika Serikat dan koalisinya secara bertahap, (2) akan dilakukan gencatan senjata, (3) akan dilakukan negosiasi intra-Afghanistan yang dilakukan secara komprehensif guna merancang Afghanistan yang lebih damai, serta (4) menjadikan Afghanistan sebagai negara yang aman dari keberadaan kelompok teroris agar tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan di Afghanistan, termasuk keamanan Amerika Serikat dan sekutunya (State Government, 2020).

Perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Afghanistan, sehingga menjadi titik balik bangkitnya Taliban, setidaknya disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama adalah faktor domestik. Invasi Amerika Serikat ke Afghanistan telah menimbulkan ongkos finansial dan ongkos manusia yang besar. Sepanjang 2001 hingga 2019, Amerika Serikat telah mengeluarkan US\$ 2 Triliun. Pengeluaran sebesar itu mencakupi banyak pos yang harus didanai, seperti pembangunan pangkalan militer, pelatihan untuk polisi dan tentara Afghanistan, pemulihan ekonomi Afghanistan, biaya apresiasi untuk prajurit Amerika Serikat yang bertugas, serta biaya perlindungan keamanan dan kesejahteraan bagi para veteran perang. Yang cukup memprihatinkan adalah biaya sebesar itu diperoleh melalui skema hutang. Invasi ke Afghanistan juga menelan ongkos nyawa prajurit. Sepanjang 2001-2019, sebanyak 2.434 prajurit Amerika Serikat gugur dalam pertempuran. Angka tersebut akan mengalami penambahan sebanyak 1.139 prajurit apabila pasukan koalisi yang gugur juga dihitungkan. Banyaknya pasukan Amerika Serikat yang gugur di *front* Afghanistan menjadi permasalahan tersendiri di level domestik Amerika Serikat karena berdampak pada krisis jumlah pasukan. Langkah Amerika Serikat untuk tetap



bertahan dan melakukan gelar pasukan di Afghanistan menjadi irasional karena akan memicu krisis jumlah pasukan yang lebih dalam.

Faktor kedua adalah faktor internasional. Amerika Serikat dikenal sebagai negara hegemoni dunia yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang unggul di segala lini, terutama militer dan perekonomian (Schubert, 2003). Oleh sebab itu, Amerika Serikat merasa berkepentingan untuk mempertahankan status tersebut. Namun demikian, perkembangan sistem internasional menghadirkan ancaman tersendiri terhadap hegemoni Amerika Serikat tersebut. Muncul negara-negara revisionis, seperti Cina dan Rusia, yang semakin menancapkan eksistensinya. Khusus dengan Cina, Amerika Serikat terlibat perang dagang yang masih berlangsung hingga kini, serta perebutan pengaruh di Asia Tengah dan Indo-Pasifik. Pengaruh Cina dan Rusia yang semakin membesar menjadi faktor penyebab terjadinya *hegemonic decline* yang dialami oleh Amerika Serikat (Agastya Wardhana, 2019). *Hegemonic decline* ini tentu saja sangat mengkhawatirkan bagi Amerika Serikat. Selain itu, yang membuat situasi menjadi kompleks adalah eksistensi mereka di Afghanistan yang menjadi variabel pendukung *hegemonic decline* tersebut.

Amerika Serikat menjadi tidak fokus terhadap bangkitnya kedua kekuatan besar dunia tersebut, sedangkan di sisi lain Amerika Serikat harus terus-menerus melakukan pengeluaran dalam hal finansial dan nyawa prajurit di Afghanistan yang telah mereka duduki selama dua dekade. Inilah klimaks yang mendorong Amerika Serikat untuk berdamai dengan Taliban hingga memutuskan penarikan pasukan secara total pada September 2021 sebagai batas akhir.

Sirkumstansi yang kurang menguntungkan Amerika Serikat tersebut pada akhirnya menjadi keuntungan yang bisa dioptimalkan oleh Taliban untuk bangkit dan berkuasa kembali. Apa yang mereka inisiasi pada 2003 melalui konsolidasi kekuatan dan kapasitas organisasional ketika Amerika Serikat terlalu fokus pada Irak merupakan jalan panjang untuk bangkit dan kembali memegang tampuk pemerintahan di Afghanistan. Taliban bersikap cerdik dan sangat kalkulatif dalam mencapai kepentingannya. Taliban melihat tiga kelemahan utama yang melekat pada Amerika Serikat hingga berujung “kekalahan” di *front* Afghanistan. Pertama, proyek besar menjadikan Afghanistan sebagai *common enemy* melalui pelabelan sebagai gerakan teror gagal total. Amerika Serikat bukan hanya menghabiskan dana



besar dan kehilangan ribuan nyawa prajurit, tapi juga mendapat penolakan dari publik domestik. Kedua, Amerika Serikat tidak cakap melakukan demokratisasi di Afghanistan pasca tergulingnya Taliban pada 2001. Pemerintah Afghanistan bentukan Amerika Serikat tidak memiliki resiliensi dalam membangun Afghanistan sebagai sebuah bangsa dan negara. Hal ini terlihat jelas dari hengkangnya Ashraf Ghani keluar negeri untuk menyelamatkan diri. Ketiga, Amerika Serikat bukanlah negara yang konsisten sebagai hegemoni dunia. Amerika Serikat juga tidak layak menjadi polisi dunia karena terlalu berorientasi pada kepentingan nasionalnya sendiri; hengkang untuk menghindari *cost* yang lebih besar, serta meninggalkan *damage* yang sangat parah di Afghanistan, baik dari sisi politik, keamanan, ekonomi, hingga sosial.

Proyeksi Kondisi Politik dan Keamanan di Afghanistan Pasca Penarikan Mundur Pasukan Militer Amerika Serikat

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat dengan melakukan penarikan mundur pasukan militernya secara total sejak Agustus 2021 merupakan refleksi dari kalkulasi rasional Amerika Serikat atas kepentingan nasionalnya. Penarikan mundur pasukan militer ini tidak dapat disebut sebagai bentuk komitmen Amerika

Serikat yang dibuat pada 2020 bersama Taliban. Dalam konteks negara adidaya seperti Amerika Serikat, sangatlah tidak mungkin bagi Amerika Serikat untuk bernegosiasi dengan kelompok yang notabene diperangi selama dua dekade. Jikapun Amerika Serikat sempat bernegosiasi dengan Taliban pada 2020, hal tersebut juga merupakan cermin dari pilihan strategi diplomasi untuk mencapai kepentingan nasional jangka panjang, yakni keluar dari *front* Afghanistan yang dianggap tidak prospektif dan banyak menyedot sumber daya, baik secara finansial maupun *human cost*. Yang patut digarisbawahi adalah Amerika Serikat mengaksentuasikan kepentingan nasionalnya dengan cara yang sangat unilateralis: tanpa memberikan pemberitahuan atau berkoordinasi terlebih dahulu dengan rezim Ashraf Ghani, yang notabene merupakan pemerintahan bentukan Amerika Serikat di Afghanistan.

Kebijakan penarikan mundur pasukan militer tanpa pemberitahuan dan koordinasi terlebih dahulu dengan Pemerintah Afghanistan di bawah rezim Ashraf Ghani ini berdampak fatal terhadap stabilitas politik dan keamanan Afghanistan. Tidak dapat dimungkiri bahwa Pemerintah Afghanistan bentukan Amerika Serikat adalah pemerintah yang rapuh dengan tata kelola pemerintahan yang sangat bergantung pada dukungan Amerika



Serikat, yakni dukungan teknis, finansial, hingga militer. Ketika infrastruktur bantuan utama Amerika Serikat tersebut dicabut, maka secara otomatis pemerintahan Afghanistan menjadi rapuh (*fragile government*). Hal inilah yang mendasari keputusan Ashraf Ghani selaku presiden Afghanistan untuk hengkang ke Uni Emirat Arab (UEA) setelah Kabul dan istana kepresidenan direbut oleh Taliban. Adapun argumen dari Ashraf Ghani yang menyatakan bahwa kepergiannya tersebut sebagai upaya untuk mencegah pertumpahan darah yang lebih besar adalah dalih semata. Sebelumnya, Ashraf Ghani memberikan tawaran kepada Taliban untuk melakukan *power sharing* di Afghanistan, namun tawaran tersebut ditolak secara tegas oleh Taliban.

Menyikapi situasi dan kondisi domestik Afghanistan yang penuh gejolak, beberapa negara mencoba turut andil dalam mendorong terciptanya perdamaian. Iran dan Pakistan yang notabene merupakan sekutu Taliban selama ini berupaya menggalas solusi damai. Hal yang sama juga dilakukan oleh Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri RI dan mantan Wakil Presiden RI, H.M. Jusuf Kalla (Nainggolan, Taliban Merebut Kembali Kekuasaan di Afghanistan, 2021). Namun demikian, solusi damai ini belum akan terwujud dalam waktu dekat.

Permasalahan mendasarnya ada dua. Pertama, terdapat perbedaan cara pandang yang tajam antara Ashraf Ghani dan Taliban. Taliban bersikukuh untuk menerapkan syariah sebagai landasan politik dan pemerintahannya. Sedangkan Ashraf Ghani yang terpilih menjadi presiden melalui skema pemilihan umum yang diinisiasi Amerika Serikat menginginkan tata kelola yang berbasis demokrasi, tepatnya demokrasi barat seperti yang diinduksi oleh Amerika Serikat selama ini. Kedua, resistensi masyarakat Afghanistan terhadap Taliban masih tinggi. Pengalaman empirik yang mereka peroleh selama diperintah oleh rezim Taliban pada 1996 hingga 2001 menimbulkan luka mendalam. Prinsip syariah diterapkan dengan interpretasi sendiri oleh rezim penguasa, tanpa dialog atau diskusi, serta ditegakkan secara represif. Hal inilah yang mendasari terjadinya eksodus besar-besaran masyarakat Afghanistan ke luar negeri. Tercatat hampir 2,2 juta masyarakat Afghanistan yang mengungsi ke negara-negara tetangga pasca naiknya kembali Taliban ke panggung kekuasaan (BBC, 2021).

Kondisi politik dan keamanan yang kondusif bagi Afghanistan di bawah Taliban saat ini sangat sulit tercapai dalam waktu dekat. Selain berupaya meraih simpati dan dukungan dari publik Afghanistan yang



akan mereka perintah, Taliban saat ini disibukkan oleh fragmentasi di level internal mereka sendiri. Fragmentasi di sini tidak terlepas dari *power sharing* dalam pengisian struktur pemerintahan. Sebagian pihak di Taliban berpendapat bahwa keberhasilan mereka dalam menguasai Afghanistan tidak terlepas dari mekanisme diplomasi yang dilakukan selama ini terhadap aktor-aktor penting yang menjadi penentu masa depan Taliban, sebagai contoh Amerika Serikat. Di sisi lain, ada juga pihak di internal Taliban yang berpendapat bahwa kemenangan Taliban yang berhasil menduduki Kabul dan istana kepresidenan tidak terlepas dari kontribusi pihak-pihak yang berjuang di jalur perang dengan mengangkat senjata. Dengan melihat situasi dan kondisi seperti ini, hal yang paling utama dan pertama kali yang harus dilakukan oleh Taliban adalah melakukan konsolidasi internal terlebih dahulu. Pada tahap selanjutnya, dengan konsolidasi yang baik maka akan membuahkan soliditas internal di tubuh Taliban sebagai mekanisme jangka panjang dalam mewujudkan soliditas Afghanistan secara keseluruhan.

Mewujudkan kondisi politik dan keamanan di Afghanistan sekali lagi bukan persoalan yang mudah untuk diwujudkan. Birokrasi dan administrasi pemerintahan yang diwariskan oleh pemerintahan

bentukan Amerika Serikat di bawah rezim Ashraf Ghani adalah birokrasi yang kotor dan korup. Sekalipun langgam yang diusung adalah demokrasi ala barat. Jadi, seandainya Taliban mampu merangkul kelompok-kelompok terdahulu yang memilih bertahan di Afghanistan, mereka belum tentu figur-figur yang kapabel dalam menggerakkan birokrasi dan administrasi pemerintahan yang sehat. Taliban juga dihadapkan pada sebuah problematika yang lebih besar bahwa untuk mewujudkan kondisi politik dan keamanan yang solid, damai, dan komprehensif di dalam negeri, maka Taliban harus mampu merangkul seluruh keragaman yang ada, terutama keragaman etnis untuk mampu berpartisipasi dalam politik dan pemerintahan. Hal ini untuk menghilangkan kesan bahwa Afghanistan hanyalah milik etnis Pashtun saja yang mendominasi struktur organisasi Taliban.

Kondisi politik dan keamanan yang kondusif juga membutuhkan akseptansi dan pengakuan dari negara lain. Afghanistan adalah sebuah negara berdaulat. Namun demikian, apakah rezim Taliban saat ini diakui secara sah keberadaannya oleh dunia internasional, tentu merupakan sebuah persoalan tersendiri. Akseptansi dan pengakuan dari negara lain menjadi penting sebagai katalisator bagi pertumbuhan ekonomi dan



pembangunan nasional Afghanistan di masa yang akan datang, terlebih lagi menilik kondisi Afghanistan hari ini yang hancur lebur ditinggalkan oleh Amerika Serikat yang gagal total mewujudkan narasi besarnya tentang Afghanistan yang demokratis. Setidaknya ada dua skenario utama yang bisa ditempuh oleh rezim Taliban ke depan untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Pertama, Taliban akan menampilkan wajah yang lebih humanis dibandingkan dengan yang dikenal oleh publik pada dekade 1990-an. Tujuannya adalah untuk menciptakan situasi politik dan keamanan yang kondusif di dalam negeri, serta mendapatkan dukungan internasional. Kedua, Taliban harus memafhumi bahwa mereka tidak dapat menjadi aktor tunggal di Afghanistan yang mengendalikan semuanya. Oleh sebab itu, dibutuhkan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat Afghanistan dalam tata politik dan pemerintahan. Dalam konteks ini, Taliban suka tidak suka harus menjalankan pemilihan umum sebagai metode partisipasi publik dan sirkulasi elit di pemerintahan. Hal ini berpeluang untuk menciptakan situasi politik dan keamanan bagi Afghanistan dalam jangka panjang.

Geopolitik Global

Kondisi politik dan keamanan Afghanistan saat ini di bawah Taliban, yang

cenderung tidak kondusif karena banyaknya persoalan yang harus satu per satu diselesaikan, langsung atau tidak langsung, akan berdampak terhadap geopolitik global. Sistem internasional dewasa ini memang bersifat multipolar, terlebih lagi dengan masifnya jumlah aktor-aktor non-negara yang mempengaruhi kepentingan nasional dan kebijakan negara-negara di dunia. Namun demikian, dalam situasi dan kondisi tertentu, anasir-anasir pertarungan kekuatan antarnegara mulai terlihat dominan. Cina dan Rusia adalah dua negara yang saat ini berupaya keras melakukan perluasan pengaruh ke seluruh dunia. Jika Rusia cenderung bermain pada skop militer, maka Cina berlaku lebih agresif dan revisionis dengan menggalang kekuatan secara simultan untuk menancapkan pengaruhnya di bidang militer, ekonomi, dan sosial, pada level global. Visi luar negeri Cina juga sangat jelas, yakni merevisi posisi Amerika Serikat sebagai hegemon dunia. Secara singkat, fenomena yang terjadi di Afghanistan dengan lengsernya Amerika Serikat dan pemerintahan bentukannya, serta naiknya Taliban ke panggung kekuasaan, tentu saja akan menjadi atensi banyak kekuatan di dunia, yakni menjadikan Afghanistan sebagai medan pengaruhnya.



Lanskap geopolitik global pertama yang patut dicermati tentu adalah Amerika Serikat sendiri sebagai negara yang pernah menduduki Afghanistan selama dua dekade lamanya. Amerika Serikat menerima dua konsekuensi dari situasi politik yang berkembang di Afghanistan saat ini, yakni konsekuensi positif dan negatif. Konsekuensi positifnya adalah Amerika Serikat akan lebih fokus dalam melakukan perimbangan kekuatan dengan Cina dan Rusia di segala bidang, tanpa perlu memikirkan lagi tentang Afghanistan yang penuh persoalan. Terlebih lagi Amerika Serikat saat ini dihadapkan pada persoalan pandemi Covid-19 yang membutuhkan dana besar untuk penanganannya. Namun demikian, Amerika Serikat harus menerima konsekuensi negatif, yakni buruknya citra mereka di panggung internasional. Narasi Amerika Serikat menjadikan Afghanistan sebagai negara demokratis dengan memberantas terorisme menjadi omong kosong sebuah negara yang mengklaim adidaya. Amerika Serikat sendiri akan dicap sebagai unilateralis sejati yang lebih mengutamakan kepentingan nasionalnya sendiri, sementara di sisi lain membiarkan Afghanistan menjadi *failed state* di segala bidang.

Lanskap geopolitik global selanjutnya adalah bagaimana Cina sebagai *major state* dunia melakukan pencermatan terhadap

situasi yang berkembang di Afghanistan. Afghanistan tentu bernilai strategis bagi Cina karena kedua negara berbagi perbatasan di darat. Hal ini dapat dilihat bagaimana Cina melakukan langkah cepat dengan memberikan beragam bantuan kepada Taliban pasca menduduki Kabul. Cina mengirimkan vaksin untuk penanganan pandemi Covid-19, obat-obatan, makanan, serta perbekalan menjelang musim dingin. Hal ini sebagai sinyal bahwa Pemerintah Cina hendak merangkul rezim Taliban yang berkuasa saat ini di Afghanistan. Secara umum, ada lima hal yang menjadi urgensi bagi Cina untuk bekerja sama dengan Taliban. Pertama, Cina membutuhkan Taliban untuk meredam ekstremisme etnis Uighur (istilah eskremisme ini lebih kepada versi Pemerintah Cina sendiri) di Provinsi Xinjiang yang beragama Islam. Cina sendiri melihat potensi meningkatnya agresivitas di wilayah Xinjiang tersebut apabila Taliban tidak segera dirangkul. Kedua, Cina memiliki perusahaan tambang tembaga terbesar di dunia yang berlokasi di Aynak, Afghanistan. Cina tentu perlu bekerja sama dengan Taliban yang sekarang berkuasa. Ketiga, Afghanistan memiliki kekayaan mineral yang luar biasa, seperti kobalt, lithium, tembaga, dan besi. Cina dapat hadir di sana sebagai negara yang membantu Afghanistan dalam hal



eksplorasi dan eksploitasi. Motif yang diusung Cina tidak jauh berbeda dengan yang dipraktikkan Amerika Serikat selama ini di belahan dunia lainnya. Keempat, Taliban sendiri yang mengundang Cina untuk memberikan asistensi. Kelima, Afghanistan merupakan bagian penting dari ambisi Cina untuk membangun jalur *One Belt One Road (OBOR)*.

Lanskap geopolitik lainnya adalah bagaimana sikap Pakistan dan India sebagai dua negara yang juga berbatasan geografis secara langsung dengan Taliban. Persoalan kedua negara tersebut dengan pemerintahan Afghanistan selama dua setengah dekade terakhir memang sangat kompleks. Genealogi Taliban tidak dapat dipisahkan dari Pakistan, yang mana Pakistan memainkan peran penting bagi terbentuknya Taliban yang berasal dari kamp-kamp pengungsi yang disediakan Pakistan dahulu pada masa perang. Namun demikian, ketika Taliban ditumbangkan Amerika Serikat pada 2001, pemerintahan Afghanistan bentukan Amerika Serikat cenderung memusuhi Pakistan dan lebih menjalin hubungan yang erat dengan India yang notabene merupakan seteru Pakistan. Dengan kembalinya Taliban di tampuk pemerintahan Afghanistan saat ini, sudah bisa dipastikan bahwa Taliban akan membina hubungan yang lebih strategis dengan Pakistan, dan ini akan menjadi

persoalan tersendiri bagi India. India dan Pakistan sendiri dalam sekian puluh tahun terakhir berseteru memperebutkan wilayah Kashmir yang melintasi kedua negara. Dengan adanya dukungan Taliban, maka posisi Pakistan akan lebih kuat dalam upaya memperebutkan Kashmir. India juga sangat mewaspadaai fenomena naiknya Taliban di Afghanistan karena berpotensi menghidupkan kembali sel-sel terorisme di Pakistan yang tentunya akan berimbas pada stabilitas keamanan India yang kerap dijadikan sasaran oleh para teroris.

Dengan tidak menegasikan lanskap geopolitik global pada unit analisis negara lainnya, lanskap geopolitik global yang menarik dicermati adalah bagaimana sikap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap berkuasanya rezim Taliban di Afghanistan. Sebagai organisasi supranasional, PBB memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia dengan mendorong mekanisme damai dan menghindari penggunaan kekerasan. PBB sendiri diproyeksi akan menempuh dua langkah yang bisa bertolak belakang satu sama lain. Pertama, PBB akan bersikap sama seperti pada dekade 1990-an, yakni tidak memberikan pengakuan terhadap Taliban karena dianggap sebagai rezim yang tidak demokratis. Kedua, PBB bisa saja memberikan pengakuan sebagai langkah



sistematis untuk menggiring Taliban untuk mematuhi jalan damai dan berubah secara bertahap menjadi rezim yang demokratis. Namun demikian, opsi pertama mungkin menjadi pilihan yang lebih rasional bagi PBB. Semuanya akan kembali dan bergantung pada sikap dan kecermatan Taliban sendiri dalam merumuskan kepentingan nasionalnya, utamanya kepentingan nasional untuk mendapatkan pengakuan dan penerimaan dari masyarakat internasional.

SIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan utama. Pertama, untuk menciptakan kondisi politik dan keamanan yang stabil di Afghanistan di bawah rezim Taliban saat ini, dibutuhkan proses yang komprehensif dan jangka waktu yang tidak singkat. Dengan kata lain, untuk beberapa waktu ke depan, kondisi Afghanistan akan diwarnai oleh instabilitas politik dan keamanan. Persoalan internal di Taliban sendiri, akseptansi masyarakat domestik yang sangat rendah, serta resistensi dunia internasional, menjadi kausanya. Kedua, kondisi politik dan keamanan yang tidak stabil tersebut akan memberikan signifikansi bagi geopolitik global, baik dari sudut unit analisis negara, seperti Amerika Serikat, Cina, India, Pakistan, dan negara lainnya, maupun PBB sebagai badan

supranasional. Pada level unit analisis negara, respons negara-negara akan sangat ditentukan oleh kepentingan nasional yang hendak mereka capai. Sedangkan pada level unit analisis organisasi global seperti PBB, respons akan cenderung berpijak pada objektif global, yakni mewujudkan perdamaian. Upaya korektif jangka panjang dari Taliban sendiri dalam menjalankan pemerintahannya akan sangat menentukan sikap PBB ke depan.

Dikarenakan penelitian ini dibatasi pada aspek politik dan keamanan, serta signifikansinya hanya pada konteks geopolitik global, maka penelitian ini memungkinkan untuk dilanjutkan oleh peneliti lainnya. Objek kajian memungkinkan untuk diteliti lebih lanjut mengingat objek kajian memiliki dimensi yang luas, tidak hanya pada dua aspek yang dianalisis saja, tapi juga mencakupi aspek ideologi, hukum, serta sosial dan budaya, serta signifikansinya dapat dipersempit seperti dalam konteks regional (Asia Tengah / Asia Selatan), atau bahkan terhadap domestik Indonesia sebagai negara yang potensial untuk terdampak oleh isu Taliban, baik secara langsung maupun tidak langsung.

DAFTAR PUSTAKA



- Agastya Wardhana, V. M. 2019. *Grand Strategy Isolasionisme Selektif: Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di Era Trump*. Retrieved September 16, 2021, from <https://www.researchgate.net>: https://www.researchgate.net/publication/340485292_Grand_Strategy_Isolasionisme_Selektif_Kebijakan_Luar_Negeri_Amerika_Serikat_di_Era_Trump
- Amal, T. A. 2004. *Politik Syariat Islam Dari Indonesia Hingga Nigeria*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Art, R. J. 2003. *A Grand Strategy for America*. Ithaca: Cornell University Press.
- Bassin, M. 2016. *Imperialism and the nation state in Friedrich Ratzel's political geography*. Retrieved September 15, 2021, from <https://citeseerx.ist.psu.edu>: <https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.860.5660&rep=rep1&type=pdf>
- BBC. 2021. *Afghanistan: How many refugees are there and where will they go?* Retrieved September 16, 2021, from <https://www.bbc.com>: <https://www.bbc.com/news/world-asia-58283177>
- Borelli, S. 2005. Casting light on the legal black hole: International law and detentions abroad in the “war on terror”. *International Review of the Red Cross Vol. 87 Number. 857, March 2005*, 39-68.
- Cheema, M. J. 2015. Pakistan - India Conflict with Special Reference to Kashmir. *South Asian Studies Vol. 30, No.1, January - June 2015*, 45-69.
- Council on Foreign Relations. 2020, September 7. *Timeline U.S War Afghanistan*. Retrieved September 16, 2021, from <https://www.cfr.org>.
- Dyke, V. V. 1962. Values and Interest. *The American Political Science Review 56 No. 3*, 567-576.
- Fawaid, J. 2021. *Mewaspada Konflik Afghanistan*. Retrieved September 15, 2021, from mpr.go.id : <https://mpr.go.id/berita/Mewaspada-Konflik-Afghanistan>
- Frankel, J. 1970. *National Interest*. Basingstoke: Plgrave Macmillan.
- Guelke, A. 2006. *Terorism and Global Disorder*. New York: I.B. Tauris Publisher.
- Katzmen Kenneth, C. T. 2017. *Afghanistan: Post-Taliban Governance, Security,*



- and US Policy. *Congressional Research Service*. Retrieved September 16, 2021, from <https://fas.org>: <https://fas.org/sgp/crs/row/RL30588>.
- Maley, W. 1999. *Taliban dan Multikonflik di Afghanistan (terjemahan)*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Nainggolan, P. P. 2013. Kepentingan Strategis Amerika Serikat di Asia Pasifik . *Jurnal Politica Vol. 4 No. 1, Mei 2013*, 77-103.
- Nainggolan, P. P. 2021. Taliban Merebut Kembali Kekuasaan di Afghanistan. *Vol. XIII, No. 16/II/Puslit/Agustus/2021*, pp. 7-12.
- Neil Katz, K. M. 1994. *Conflict Resolution*. Retrieved September 15, 2021, from <https://www.maxwell.syr.edu>: <https://www.maxwell.syr.edu/uploadedFiles/parcc/cmc/Conflict%20Resolution%20NK.pdf>
- Nojum, N. 2002. *The Rise of the Taliban in Afghanistan: Mass Mobilization Civil War and the Future of the Region*. UK: St Martin's Press.
- Potter, J. 2013. *An Analysis of Thinking and Research about Qualitative Methods*. New York: Routledge.
- Rashid, A. 2000. *Taliban Militant Islam, Oil and Fundamentalism in Central Asia*. London: Yale University Press.
- Scholvin, S. 2016. Geopolitics: An Overview of Concepts and Empirical Examples from International Relations. *FIIA Working Paper April 2016*, 24-25.
- Schubert. 2003. *Hegemonic Stability Theory: The Rise and Fall of the US Leadership in World Economic Relation*. Retrieved September 16, 2021, from <https://www.grin.com>: <https://www.grin.com/document/22451>
- Spevack, A. 2014. *The Archetypal Sunni Scholar: Law, Theology, and Mysticism in the Synthesis of Al-Bajuri*. New York: State University of New York Press.
- State Government. 2020. *Agreement for Bringing Peace to Afghanistan between the Islamic Emirate of Afghanistan which is not recognized by the United States as a state and is known as the Taliban and the United States of America*. Retrieved September 16, 2021,



from <https://www.state.gov>:
<https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/Agreement-For-Bringing-Peace-to-Afghanistan-02.29.20.pdf>

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT. Alfabet.

Tristram, P. 1986. *History of the Taliban: Who They Are, What They Want*. Retrieved September 15, 2021, from <https://www.slps.org>:
<https://www.slps.org/cms/lib/MO01001157/Centricity/Domain/2515/History%20of%20the%20Taliban%20Article.doc>